



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

NOMOR 157/PMK.07/2012

TENTANG

ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK  
PENGHASILAN PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM  
NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN ANGGARAN 2008,  
TAHUN ANGGARAN 2009, DAN TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

**Menimbang** : bahwa dalam rangka penetapan alokasi Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2008, Tahun Anggaran 2009, dan Tahun Anggaran 2010 yang telah dialokasikan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2008, Tahun Anggaran 2009, dan Tahun Anggaran 2010;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5303); *sw*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

2

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN ANGGARAN 2008, TAHUN ANGGARAN 2009, DAN TAHUN ANGGARAN 2010.

**Pasal 1**

Alokasi Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan (DBH PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPND) dan PPh Pasal 21 Tahun Anggaran 2008, Tahun Anggaran 2009, dan Tahun Anggaran 2010 merupakan selisih kurang dan selisih lebih antara alokasi definitif DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WPOPND dan PPh Pasal 21 Tahun Anggaran 2008, Tahun Anggaran 2009, dan Tahun Anggaran 2010 dengan DBH berdasarkan realisasi penerimaan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WPOPND dan PPh Pasal 21 Tahun Anggaran 2008, Tahun Anggaran 2009, dan Tahun Anggaran 2010.

**Pasal 2**

- (1) Alokasi Kurang Bayar DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WPOPND dan PPh Pasal 21 Tahun Anggaran 2008, Tahun Anggaran 2009, dan Tahun Anggaran 2010 adalah sebesar Rp2.679.064.650.000,00 (dua triliun enam ratus tujuh puluh sembilan miliar enam puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), terdiri atas:
  - a. Alokasi Kurang Bayar DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WPOPND adalah sebesar Rp114.178.678.131,00 (seratus empat belas miliar seratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tiga puluh satu rupiah); dan
  - b. Alokasi Kurang Bayar DBH PPh Pasal 21 adalah sebesar Rp2.564.885.971.869,00 (dua triliun lima ratus enam puluh empat miliar delapan ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah).



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

3

- (2) Rincian Alokasi Kurang Bayar DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WPOPND dan PPh Pasal 21 Tahun Anggaran 2008, Tahun Anggaran 2009, dan Tahun Anggaran 2010 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 3

- (1) Alokasi Lebih Bayar DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WPOPND dan PPh Pasal 21 Tahun Anggaran 2008, Tahun Anggaran 2009, dan Tahun Anggaran 2010 adalah sebesar Rp164.264.673.063,00 (seratus enam puluh empat miliar dua ratus enam puluh empat juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu enam puluh tiga rupiah), terdiri atas:
  - a. Alokasi Lebih Bayar DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WPOPND adalah sebesar Rp12.534.927.748,00 (dua belas miliar lima ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah); dan
  - b. Alokasi Lebih Bayar DBH PPh Pasal 21 adalah sebesar Rp151.729.745.315,00 (seratus lima puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus lima belas rupiah).
- (2) Rincian Alokasi Lebih Bayar DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WPOPND dan PPh Pasal 21 Tahun Anggaran 2008, Tahun Anggaran 2009, dan Tahun Anggaran 2010 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 4

- (1) Penyaluran Alokasi Kurang Bayar DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WPOPND dan PPh Pasal 21 Tahun Anggaran 2008, Tahun Anggaran 2009, dan Tahun Anggaran 2010 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan sekaligus, paling lambat pada bulan Desember Tahun 2012.
- (2) Alokasi Lebih Bayar DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WPOPND dan PPh Pasal 21 Tahun Anggaran 2008, Tahun Anggaran 2009, dan Tahun Anggaran 2010 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diperhitungkan dengan alokasi DBH Pajak yang sejenis atau DBH lainnya secara sekaligus pada Tahun Anggaran 2012 dan/atau secara bertahap pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Penyaluran Alokasi Kurang Bayar dan Penyelesaian Lebih Bayar DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WPOPND dan PPh Pasal 21 Tahun Anggaran 2008, Tahun Anggaran 2009, dan Tahun Anggaran 2010 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

4

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Oktober 2012  
MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Oktober 2012  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

AMIR SYAMSUDIN  
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 1008  
Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM

u.b.  
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

  
GIARTO  
NIP 195904201984021001





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 157 /PMK.07/2012  
TENTANG  
ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DANA  
BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DAN PASAL  
21 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN  
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN ANGGARAN 2008,  
TAHUN ANGGARAN 2009, DAN TAHUN ANGGARAN 2010

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DAN PASAL 29  
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21  
TAHUN ANGGARAN 2008, TAHUN ANGGARAN 2009, DAN TAHUN ANGGARAN 2010

(dalam rupiah penuh)

NO	DAERAH	TAHUN ANGGARAN 2008 SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2010		TOTAL
		PPh WPOPDN	PPh PASAL 21	
1	2	3	4	5
1	Provinsi Aceh	281.394.339	13.832.278.722	14.113.673.061
1	Kab. Aceh Barat	13.232.764	2.226.758.613	2.239.991.377
2	Kab. Aceh Besar	22.452.639	1.370.286.085	1.392.738.724
3	Kab. Aceh Selatan	8.285.296	461.796.630	470.081.926
4	Kab. Aceh Singkil	5.357.818	445.154.799	450.512.617
5	Kab. Aceh Tengah	-	135.892.666	135.892.666
6	Kab. Aceh Tenggara	6.017.642	311.726.856	317.744.498
7	Kab. Aceh Timur	6.025.090	493.793.116	499.818.206
8	Kab. Aceh Utara	24.669.800	2.115.888.525	2.140.558.325
9	Kab. Bireuen	-	160.312.934	160.312.934
10	Kab. Pidie	19.870.698	570.614.758	590.485.456
11	Kab. Simeulue	6.550.208	418.323.680	424.873.888
12	Kota Banda Aceh	228.371.984	2.781.346.243	3.009.718.227
13	Kota Sabang	15.736.605	367.633.072	383.369.677
14	Kota Langsa	16.687.326	672.741.624	689.428.950
15	Kota Lhokseumawe	7.203.549	4.131.800.961	4.139.004.510
16	Kab. Nagan Raya	6.038.920	1.444.368.976	1.450.407.896
17	Kab. Aceh Jaya	5.480.602	800.221.736	805.702.338
18	Kab. Aceh Barat Daya	7.878.410	393.391.549	401.269.959
19	Kab. Gayo Lues	6.548.865	371.851.972	378.400.837
20	Kab. Aceh Tamiang	16.440.944	534.809.866	551.250.810
21	Kab. Bener Meriah	6.619.030	286.909.150	293.528.180
22	Kota Subulussalam	7.309.672	201.505.536	208.815.208
23	Kab. Pidie Jaya	4.453.157	32.149.246	36.602.403
II	Provinsi Sumatera Utara	1.742.276.422	47.429.469.304	49.171.745.726
1	Kab. Asahan	-	1.995.896.511	1.995.896.511
2	Kab. Dairi	31.100.662	580.484.194	611.584.856
3	Kab. Deli Serdang	57.438.454	1.070.528.423	1.127.966.877
4	Kab. Tanah Karo	31.354.468	862.951.016	894.305.484
5	Kab. Labuhan Batu	56.641.231	1.921.522.704	1.978.163.935
6	Kab. Langkat	79.646.948	2.621.138.818	2.700.785.766
7	Kab. Mandailing Natal	51.216.251	2.781.218.333	2.832.434.584
8	Kab. Nias	44.264.981	579.410.122	623.675.103
9	Kab. Simalungun	62.074.674	2.457.547.322	2.519.621.996
10	Kab. Tapanuli Selatan	32.868.561	1.681.435.084	1.714.303.645
11	Kab. Tapanuli Tengah	35.766.088	744.508.160	780.274.248
12	Kab. Tapanuli Utara	-	1.667.617.224	1.667.617.224
13	Kab. Toba Samosir	-	792.253.105	792.253.105
14	Kota Binjai	120.394.121	1.537.362.178	1.657.756.299
15	Kota Medan	5.129.055.227	25.886.822.357	31.015.877.584
16	Kota Pematang Siantar	172.041.311	3.395.246.199	3.567.287.510



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

(dalam rupiah penuh)

NO	DAERAH	TAHUN ANGGARAN 2008 SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2010		TOTAL
		PPh WPOPDN	PPh PASAL 21	
1	2	3	4	5
17	Kota Sibolga	32.098.614	13.548.036	45.646.650
18	Kota Tanjung Balai	-	1.018.759.693	1.018.759.693
19	Kota Tebing Tinggi	22.482.356	1.753.127.563	1.775.609.919
20	Kota Padang Sidempuan	26.242.566	5.765.928.877	5.792.171.443
21	Kab. Pakpak Bharat	33.734.524	550.790.857	584.525.381
22	Kab. Nias Selatan	52.093.353	382.054.249	434.147.602
23	Kab. Humbang Hasundutan	-	76.150.654	76.150.654
24	Kab. Serdang Berdagai	32.683.223	2.896.508.106	2.929.191.329
25	Kab. Samosir	-	247.915.188	247.915.188
26	Kab. Batu Bara	8.701.228	2.206.635.027	2.215.336.255
27	Kab. Padang Lawas Utara	-	325.954.014	325.954.014
28	Kab. Padang Lawas	-	295.704.809	295.704.809
29	Kab. Labuhan Batu Selatan	-	598.069.957	598.069.957
30	Kab. Labuhan Batu Utara	-	366.112.677	366.112.677
31	Kab. Nias Utara	9.867.555	132.672.722	142.540.277
32	Kab. Nias Barat	9.680.909	130.892.859	140.573.768
33	Kota Gunungsitoli	2.557.474	286.846.815	289.404.289
III	Provinsi Sumatera Barat	-	52.019.599.755	52.019.599.755
1	Kab. Limapuluh Kota	-	1.776.911.539	1.776.911.539
2	Kab. Agam	-	3.268.797.247	3.268.797.247
3	Kab. Kepulauan Mentawai	-	1.679.907.301	1.679.907.301
4	Kab. Padang Pariaman	-	3.121.757.806	3.121.757.806
5	Kab. Pasaman	-	2.459.956.565	2.459.956.565
6	Kab. Pesisir Selatan	-	3.200.051.840	3.200.051.840
7	Kab. Sijunjung	-	1.595.137.096	1.595.137.096
8	Kab. Solok	-	1.717.955.412	1.717.955.412
9	Kab. Tanah Datar	-	1.942.545.366	1.942.545.366
10	Kota Bukit Tinggi	-	4.913.894.269	4.913.894.269
11	Kota Padang Panjang	-	2.006.209.244	2.006.209.244
12	Kota Padang	-	35.726.587.281	35.726.587.281
13	Kota Payakumbuh	-	1.840.335.801	1.840.335.801
14	Kota Sawahlunto	-	1.904.594.163	1.904.594.163
15	Kota Solok	-	1.904.389.937	1.904.389.937
16	Kota Pariaman	-	2.939.971.879	2.939.971.879
17	Kab. Pasaman Barat	-	2.644.990.036	2.644.990.036
18	Kab. Dharmasraya	-	1.942.025.679	1.942.025.679
19	Kab. Solok Selatan	-	1.443.381.205	1.443.381.205
IV	Provinsi Riau	1.319.061.237	26.046.729.147	27.365.790.384
1	Kab. Indragiri Hilir	383.514.936	2.087.238.795	2.470.753.731
2	Kab. Indragiri Hulu	744.392.073	1.997.717.465	2.742.109.538
3	Kab. Kampar	53.055.480	474.114.946	527.170.426
4	Kab. Kuantan Singingi	146.026.057	1.612.465.480	1.758.491.537
5	Kab. Pelalawan	94.819.286	6.610.461.802	6.705.281.088
6	Kab. Rokan Hilir	45.172.690	8.368.857.348	8.414.030.038



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

(dalam rupiah penuh)

NO	DAERAH	TAHUN ANGGARAN 2008 SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2010		TOTAL
		PPh WPOPDN	PPh PASAL 21	
1	2	3	4	5
7	Kab. Rokan Hulu	52.605.479	1.376.508.513	1.429.113.992
8	Kota Dumai	42.485.173	26.457.019.114	26.499.504.287
9	Kota Pekanbaru	592.017.682	6.430.985.104	7.023.002.786
10	Kab. Kepulauan Meranti	-	408.762.445	408.762.445
11	Kab. Natuna	-	2.485.852.762	2.485.852.762
12	Kab. Karimun	-	1.019.539.616	1.019.539.616
13	Kota Tanjung Pinang	-	1.081.731.567	1.081.731.567
V	Provinsi Jambi	-	20.126.696.333	20.126.696.333
1	Kab. Batanghari	3.622.362	3.762.724.337	3.766.346.699
2	Kab. Bungo	-	3.422.397.178	3.422.397.178
3	Kab. Kerinci	-	1.117.308.759	1.117.308.759
4	Kab. Merangin	-	1.227.739.610	1.227.739.610
5	Kab. Muaro Jambi	9.027.252	2.108.388.996	2.117.416.248
6	Kab. Sarolangun	-	885.090.216	885.090.216
7	Kab. Tanjung Jabung Barat	-	868.980.894	868.980.894
8	Kab. Tanjung Jabung Timur	-	1.720.696.566	1.720.696.566
9	Kab. Tebo	-	1.668.094.770	1.668.094.770
10	Kota Jambi	338.901.309	12.220.517.172	12.559.418.481
11	Kota Sungai Penuh	-	836.555.092	836.555.092
VI	Provinsi Sumatera Selatan	-	18.695.351.108	18.695.351.108
1	Kab. Lahat	-	1.104.457.665	1.104.457.665
2	Kab. Musi Rawas	-	1.043.644.301	1.043.644.301
3	Kab. Ogan Komering Ulu	-	5.253.740.869	5.253.740.869
4	Kota Palembang	-	17.516.094.568	17.516.094.568
5	Kota Pagar Alam	-	711.694.741	711.694.741
6	Kota Lubuk Linggau	19.086.178	4.686.348.840	4.705.435.018
7	Kab. Ogan Ilir	-	143.095.203	143.095.203
8	Kab. OKU Timur	-	2.017.783.198	2.017.783.198
9	Kab. OKU Selatan	-	1.747.983.864	1.747.983.864
10	Kab. Empat Lawang	-	676.648.471	676.648.471
VII	Provinsi Bangka Belitung	-	3.526.896.767	3.526.896.767
1	Kab. Belitung	-	135.619.510	135.619.510
2	Kota Pangkal Pinang	65.973.179	5.155.214.519	5.221.187.698
3	Kab. Bangka Selatan	-	78.791.244	78.791.244
4	Kab. Bangka Barat	-	148.437.463	148.437.463
5	Kab. Belitung Timur	-	184.923.297	184.923.297
VIII	Provinsi Bengkulu	-	7.553.178.174	7.553.178.174
1	Kab. Bengkulu Selatan	-	1.084.714.573	1.084.714.573
2	Kab. Bengkulu Utara	-	133.290.090	133.290.090
3	Kab. Rejang Lebong	-	360.926.620	360.926.620
4	Kota Bengkulu	-	6.930.855.487	6.930.855.487
5	Kab. Kaur	-	686.165.025	686.165.025
6	Kab. Seluma	-	891.381.577	891.381.577
7	Kab. Mukomuko	-	219.905.608	219.905.608



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

(dalam rupiah penuh)

NO	DAERAH	TAHUN ANGGARAN 2008 SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2010		TOTAL
		PPh WPOPDN	PPh PASAL 21	
1	2	3	4	5
8	Kab. Lebong	-	323.303.954	323.303.954
9	Kab. Kepahiang	-	341.154.790	341.154.790
10	Kab. Bengkulu Tengah	-	358.069.555	358.069.555
IX	Provinsi Lampung	-	27.712.919.850	27.712.919.850
1	Kab. Lampung Barat	-	1.122.141.742	1.122.141.742
2	Kab. Lampung Selatan	-	62.908.106	62.908.106
3	Kab. Lampung Tengah	133.366.137	5.619.910.192	5.753.276.329
4	Kab. Lampung Utara	-	1.300.959.652	1.300.959.652
5	Kab. Lampung Timur	298.953.162	3.588.388.945	3.887.342.107
6	Kab. Tanggamus	-	1.247.170.850	1.247.170.850
7	Kab. Way Kanan	-	1.182.879.715	1.182.879.715
8	Kota Bandar Lampung	14.474.222	20.870.982.863	20.885.457.085
9	Kota Metro	185.047.529	3.629.680.304	3.814.727.833
10	Kab. Pesawaran	-	1.202.289.308	1.202.289.308
11	Kab. Pringsewu	705.138	600.034.552	600.739.690
12	Kab. Mesuji	-	378.126.800	378.126.800
13	Kab. Tulang Bawang Barat	-	395.775.413	395.775.413
X	Provinsi DKI Jakarta	64.741.180.150	616.893.256.688	681.634.436.838
XI	Provinsi Jawa Barat	-	91.371.428.112	91.371.428.112
1	Kab. Bandung	131.209.135	6.286.237.460	6.417.446.595
2	Kab. Bogor	-	8.686.788.301	8.686.788.301
3	Kab. Ciamis	-	4.166.662.194	4.166.662.194
4	Kab. Cianjur	-	4.404.201.665	4.404.201.665
5	Kab. Cirebon	-	4.181.252.081	4.181.252.081
6	Kab. Garut	-	4.024.899.638	4.024.899.638
7	Kab. Indramayu	-	4.547.702.496	4.547.702.496
8	Kab. Karawang	-	6.327.660.711	6.327.660.711
9	Kab. Kuningan	-	3.224.152.187	3.224.152.187
10	Kab. Majalengka	-	2.863.921.677	2.863.921.677
11	Kab. Purwakarta	-	3.635.403.325	3.635.403.325
12	Kab. Subang	-	2.410.925.692	2.410.925.692
13	Kab. Sukabumi	-	2.847.961.245	2.847.961.245
14	Kab. Sumedang	-	5.167.153.136	5.167.153.136
15	Kab. Tasikmalaya	-	2.393.815.096	2.393.815.096
16	Kota Bandung	-	29.993.312.864	29.993.312.864
17	Kota Bekasi	5.062.260.195	42.367.157.889	47.429.418.084
18	Kota Bogor	-	6.947.068.973	6.947.068.973
19	Kota Cirebon	26.698.708	4.087.359.075	4.114.057.783
20	Kota Depok	-	6.195.510.750	6.195.510.750
21	Kota Sukabumi	-	2.243.020.724	2.243.020.724
22	Kota Cimahi	-	2.319.502.737	2.319.502.737
23	Kota Tasikmalaya	201.080.162	3.121.234.338	3.322.314.500
24	Kota Banjar	-	2.262.969.642	2.262.969.642
25	Kab. Bandung Barat	-	3.098.845.432	3.098.845.432





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

(dalam rupiah penuh)

NO	DAERAH	TAHUN ANGGARAN 2008 SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2010		TOTAL
		PPh WPOPDN	PPh PASAL 21	
1	2	3	4	5
XII	Provinsi Banten	1.194.212.451	24.884.954.900	26.079.167.351
1	Kab. Lebak	101.819.851	1.874.001.528	1.975.821.379
2	Kab. Pandeglang	94.673.510	2.041.720.760	2.136.394.270
3	Kab. Serang	-	5.103.579.012	5.103.579.012
4	Kab. Tangerang	1.634.814.491	5.158.292.505	6.793.106.996
5	Kota Cilegon	-	939.634.559	939.634.559
6	Kota Tangerang	374.479.999	15.525.961.344	15.900.441.343
7	Kota Serang	-	2.911.432.400	2.911.432.400
8	Kota Tangerang Selatan	-	3.358.341.076	3.358.341.076
XIII	Provinsi Jawa Tengah	2.364.052.147	74.725.361.634	77.089.413.781
1	Kab. Banjarnegara	-	241.602.432	241.602.432
2	Kab. Banyumas	243.228.630	3.206.984.125	3.450.212.755
3	Kab. Batang	47.554.165	2.007.492.504	2.055.046.669
4	Kab. Blora	113.731.817	2.193.211.655	2.306.943.472
5	Kab. Boyolali	-	1.065.538.364	1.065.538.364
6	Kab. Brebes	38.551.031	2.263.626.325	2.302.177.356
7	Kab. Cilacap	-	2.839.265.465	2.839.265.465
8	Kab. Demak	512.208	1.374.691.210	1.375.203.418
9	Kab. Grobogan	91.877.510	2.069.398.559	2.161.276.069
10	Kab. Jepara	393.752.974	2.757.055.453	3.150.808.427
11	Kab. Karanganyar	37.244.954	1.976.182.689	2.013.427.643
12	Kab. Kebumen	18.369.953	2.091.294.580	2.109.664.533
13	Kab. Kendal	84.291.500	2.362.978.243	2.447.269.743
14	Kab. Klaten	-	3.112.335.008	3.112.335.008
15	Kab. Kudus	-	269.400.927	269.400.927
16	Kab. Magelang	-	3.490.804.756	3.490.804.756
17	Kab. Pati	228.658.608	2.409.905.313	2.638.563.921
18	Kab. Pekalongan	51.602.512	1.505.549.122	1.557.151.634
19	Kab. Pemasang	64.331.105	1.862.209.524	1.926.540.629
20	Kab. Purbalingga	12.386.651	333.316.039	345.702.690
21	Kab. Purworejo	104.999.798	2.180.103.445	2.285.103.243
22	Kab. Rembang	104.087.763	1.742.260.578	1.846.348.341
23	Kab. Semarang	66.892.085	2.766.883.899	2.833.775.984
24	Kab. Sragen	37.998.743	1.620.311.335	1.658.310.078
25	Kab. Sukoharjo	-	395.281.746	395.281.746
26	Kab. Tegal	46.330.184	2.260.379.109	2.306.709.293
27	Kab. Temanggung	-	1.417.099.177	1.417.099.177
28	Kab. Wonogiri	-	822.935.734	822.935.734
29	Kab. Wonosobo	-	1.399.802.570	1.399.802.570
30	Kota Magelang	-	3.327.639.809	3.327.639.809
31	Kota Pekalongan	158.957.994	2.317.890.931	2.476.848.925
32	Kota Salatiga	74.095.086	1.772.272.979	1.846.368.065
33	Kota Semarang	3.535.065.035	40.280.136.185	43.815.201.220
34	Kota Surakarta	369.318.712	5.200.993.638	5.570.312.350



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

(dalam rupiah penuh)

NO	DAERAH	TAHUN ANGGARAN 2008 SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2010		TOTAL
		PPh WPOPDN	PPh PASAL 21	
1	2	3	4	5
35	Kota Tegal	113.062.552	2.660.385.715	2.773.448.267
XIV	Provinsi DI Yogyakarta	607.462.228	22.899.500.393	23.506.962.621
1	Kab. Bantul	59.180.006	3.671.224.571	3.730.404.577
2	Kab. Gunung Kidul	20.702.124	3.742.770.355	3.763.472.479
3	Kab. Kulon Progo	67.160.031	3.432.894.950	3.500.054.981
4	Kab. Sleman	356.219.206	11.674.985.793	12.031.204.999
5	Kota Yogyakarta	407.931.979	11.827.374.923	12.235.306.902
XV	Provinsi Jawa Timur	3.693.373.249	130.929.169.780	134.622.543.029
1	Kab. Bangkalan	23.017.314	2.425.090.414	2.448.107.728
2	Kab. Banyuwangi	156.462.746	6.028.935.914	6.185.398.660
3	Kab. Blitar	43.597.898	2.403.288.350	2.446.886.248
4	Kab. Bojonegoro	32.906.642	4.849.514.055	4.882.420.697
5	Kab. Bondowoso	86.469.460	3.183.395.003	3.269.864.463
6	Kab. Gresik	-	8.214.678.166	8.214.678.166
7	Kab. Jember	358.335.075	5.384.374.171	5.742.709.246
8	Kab. Jombang	-	2.568.518.842	2.568.518.842
9	Kab. Kediri	57.917.903	3.717.126.600	3.775.044.503
10	Kab. Lamongan	-	3.846.419.738	3.846.419.738
11	Kab. Lumajang	7.763.935	2.670.520.467	2.678.284.402
12	Kab. Madiun	4.207.280	2.779.605.598	2.783.812.878
13	Kab. Magetan	47.658.987	4.203.437.776	4.251.096.763
14	Kab. Malang	224.205.220	4.936.256.888	5.160.462.108
15	Kab. Mojokerto	-	3.135.208.097	3.135.208.097
16	Kab. Nganjuk	59.758.437	2.990.915.874	3.050.674.311
17	Kab. Ngawi	51.588.782	4.273.951.197	4.325.539.979
18	Kab. Pacitan	3.169.474	2.663.555.936	2.666.725.410
19	Kab. Pamekasan	10.767.758	3.198.523.956	3.209.291.714
20	Kab. Pasuruan	-	1.512.147.672	1.512.147.672
21	Kab. Ponorogo	26.412.902	2.982.644.878	3.009.057.780
22	Kab. Probolinggo	18.267.667	3.637.629.464	3.655.897.131
23	Kab. Sampang	39.511.030	2.359.567.552	2.399.078.582
24	Kab. Sidoarjo	1.248.804.087	14.078.924.299	15.327.728.386
25	Kab. Situbondo	88.901.758	3.299.592.038	3.388.493.796
26	Kab. Sumenep	30.643.911	4.394.687.045	4.425.330.956
27	Kab. Trenggalek	24.971.046	2.836.833.571	2.861.804.617
28	Kab. Tuban	162.827.365	8.503.030.467	8.665.857.832
29	Kab. Tulungagung	-	3.204.858.038	3.204.858.038
30	Kota Blitar	41.176.310	2.288.372.069	2.329.548.379
31	Kota Kediri	-	3.970.749.944	3.970.749.944
32	Kota Madiun	-	4.959.098.297	4.959.098.297
33	Kota Malang	1.700.008.911	9.559.760.436	11.259.769.347
34	Kota Mojokerto	-	2.098.813.738	2.098.813.738
35	Kota Pasuruan	-	1.897.407.653	1.897.407.653
36	Kota Probolinggo	-	2.615.833.863	2.615.833.863



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

(dalam rupiah penuh)

NO	DAERAH	TAHUN ANGGARAN 2008 SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2010		TOTAL
		PPh WPOPDN	PPh PASAL 21	
1	2	3	4	5
37	Kota Surabaya	4.768.542.092	42.405.597.935	47.174.140.027
38	Kota Batu	94.115.853	2.442.938.747	2.537.054.600
XVI	Provinsi Kalimantan Barat	569.502.002	15.598.065.609	16.167.567.611
1	Kab. Bengkayang	6.640.404	2.107.815.361	2.114.455.765
2	Kab. Kapuas Hulu	2.938.900	148.817.355	151.756.255
3	Kab. Ketapang	-	168.479.021	168.479.021
4	Kab. Sambas	34.863.740	2.914.486.524	2.949.350.264
5	Kab. Sintang	-	57.184.625	57.184.625
6	Kota Pontianak	775.236.342	14.459.766.100	15.235.002.442
7	Kota Singkawang	52.650.534	2.387.951.064	2.440.601.598
8	Kab. Sekadau	6.418.798	302.650.709	309.069.507
9	Kab. Melawi	-	475.663.892	475.663.892
10	Kab. Kayong Utara	19.189.113	403.159.393	422.348.506
11	Kab. Kubu Raya	-	1.073.290.664	1.073.290.664
XVII	Provinsi Kalimantan Tengah	-	11.195.352.356	11.195.352.356
1	Kab. Barito Selatan	-	84.373.799	84.373.799
2	Kab. Barito Utara	-	91.424.816	91.424.816
3	Kab. Kapuas	-	1.669.693.465	1.669.693.465
4	Kab. Kotawaringin Timur	-	3.286.903.029	3.286.903.029
5	Kota Palangkaraya	-	8.765.061.097	8.765.061.097
6	Kab. Barito Timur	-	216.082.657	216.082.657
7	Kab. Murung Raya	-	404.683.551	404.683.551
8	Kab. Pulang Pisau	-	1.071.605.838	1.071.605.838
9	Kab. Gunung Mas	-	1.086.542.532	1.086.542.532
10	Kab. Lamandau	-	116.856.889	116.856.889
11	Kab. Sukamara	-	267.109.420	267.109.420
12	Kab. Katingan	-	733.204.933	733.204.933
13	Kab. Seruyan	-	1.062.506.537	1.062.506.537
XVIII	Provinsi Kalimantan Selatan	-	18.757.904.337	18.757.904.337
1	Kab. Banjar	-	5.783.676.988	5.783.676.988
2	Kab. Barito Kuala	-	1.492.962.048	1.492.962.048
3	Kab. Hulu Sungai Selatan	-	624.227.153	624.227.153
4	Kab. Hulu Sungai Tengah	-	613.409.736	613.409.736
5	Kab. Hulu Sungai Utara	-	120.199.670	120.199.670
6	Kab. Tanah Laut	-	4.522.745.833	4.522.745.833
7	Kab. Tapin	-	728.869.625	728.869.625
8	Kota Banjarbaru	-	8.789.801.863	8.789.801.863
9	Kota Banjarmasin	-	10.442.210.184	10.442.210.184
10	Kab. Balangan	-	266.843.268	266.843.268
XIX	Provinsi Kalimantan Timur	-	3.394.795.248	3.394.795.248
1	Kab. Berau	35.509.241	770.433.674	805.942.915
2	Kab. Bulungan	4.399.410	683.787.282	688.186.692
3	Kab. Malinau	223.083	357.135.795	357.358.878
4	Kab. Nunukan	5.065.802	309.036.951	314.102.753



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

(dalam rupiah penuh)

NO	DAERAH	TAHUN ANGGARAN 2008 SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2010		TOTAL
		PPh WPOP DN	PPh PASAL 21	
1	2	3	4	5
5	Kab. Pasir	-	367.464.851	367.464.851
6	Kota Balikpapan	-	5.103.726.902	5.103.726.902
7	Kota Samarinda	-	18.469.003.160	18.469.003.160
8	Kota Tarakan	270.478.946	3.490.152.672	3.760.631.618
9	Kab. Tana Tidung	-	177.253.385	177.253.385
XX	Provinsi Sulawesi Utara	67.189.915	6.732.089.782	6.799.279.697
1	Kab. Minahasa	-	282.233.547	282.233.547
2	Kab. Sangihe	-	408.026.010	408.026.010
3	Kota Bitung	-	433.851.559	433.851.559
4	Kota Manado	349.482.473	6.549.865.686	6.899.348.159
5	Kab. Kepulauan Talaud	-	178.303.712	178.303.712
6	Kota Tomohon	12.759.209	454.942.888	467.702.097
7	Kab. Minahasa Utara	-	1.209.649.839	1.209.649.839
8	Kab. Bolaang Mongondow Utara	-	93.905.496	93.905.496
9	Kota Kotamobagu	-	30.637.605	30.637.605
10	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biara	-	243.118.090	243.118.090
11	Kab. Bolaang Mongondow Timur	-	200.529.357	200.529.357
12	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	-	219.556.217	219.556.217
XXI	Provinsi Gorontalo	-	3.798.643.463	3.798.643.463
1	Kab. Boalemo	-	529.199.695	529.199.695
2	Kab. Gorontalo	-	1.004.907.858	1.004.907.858
3	Kota Gorontalo	-	2.497.194.054	2.497.194.054
4	Kab. Pohuwato	-	636.188.775	636.188.775
5	Kab. Bone Bolango	-	617.783.544	617.783.544
6	Kab. Gorontalo Utara	-	412.691.280	412.691.280
XXII	Provinsi Sulawesi Tengah	-	6.460.175.362	6.460.175.362
1	Kab. Banggai	-	1.823.401.982	1.823.401.982
2	Kab. Banggai Kepulauan	-	881.421.402	881.421.402
3	Kab. Buol	-	62.184.880	62.184.880
4	Kab. Donggala	-	531.793.762	531.793.762
5	Kab. Morowali	-	280.370.373	280.370.373
6	Kab. Poso	-	322.593.961	322.593.961
7	Kota Palu	-	4.857.538.592	4.857.538.592
8	Kab. Parigi Moutong	-	838.825.783	838.825.783
9	Kab. Tojo Una Una	-	392.807.334	392.807.334
10	Kab. Sigi	-	200.438.682	200.438.682
XXIII	Provinsi Sulawesi Selatan	-	30.470.500.639	30.470.500.639
1	Kab. Bantaeng	-	711.297.502	711.297.502
2	Kab. Barru	-	1.030.190.231	1.030.190.231
3	Kab. Bone	-	1.929.366.990	1.929.366.990
4	Kab. Bulukumba	-	852.397.816	852.397.816
5	Kab. Enrekang	-	794.452.075	794.452.075
6	Kab. Gowa	-	943.229.106	943.229.106
7	Kab. Jeneponto	-	815.839.421	815.839.421



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

(dalam rupiah penuh)

NO	DAERAH	TAHUN ANGGARAN 2008 SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2010		TOTAL
		PPh WPOPND	PPh PASAL 21	
1	2	3	4	5
8	Kab. Luwu	-	631.818.497	631.818.497
9	Kab. Luwu Utara	-	706.515.464	706.515.464
10	Kab. Maros	-	853.510.507	853.510.507
11	Kab. Pangkajene Kepulauan	-	1.143.475.487	1.143.475.487
12	Kab. Pinrang	-	1.228.255.815	1.228.255.815
13	Kab. Kepulauan Selayar	-	713.892.641	713.892.641
14	Kab. Sidenreng Rappang	-	1.107.840.358	1.107.840.358
15	Kab. Sinjai	-	821.600.060	821.600.060
16	Kab. Soppeng	-	972.725.761	972.725.761
17	Kab. Takalar	-	816.790.628	816.790.628
18	Kab. Tana Toraja	-	703.161.068	703.161.068
19	Kab. Wajo	-	1.348.061.094	1.348.061.094
20	Kota Parepare	-	2.105.428.691	2.105.428.691
21	Kota Makassar	-	21.039.468.196	21.039.468.196
22	Kota Palopo	-	686.404.306	686.404.306
23	Kab. Luwu Timur	-	3.460.067.968	3.460.067.968
24	Kab. Toraja Utara	-	289.961.324	289.961.324
XXIV	Provinsi Sulawesi Barat	-	2.387.329.123	2.387.329.123
1	Kab. Majene	-	413.829.028	413.829.028
2	Kab. Mamuju	-	1.481.503.149	1.481.503.149
3	Kab. Polewali Mandar	-	462.358.503	462.358.503
4	Kab. Mamasa	-	358.883.186	358.883.186
5	Kab. Mamuju Utara	-	864.419.826	864.419.826
XXV	Provinsi Sulawesi Tenggara	-	2.596.862.401	2.596.862.401
1	Kab. Buton	-	330.359.917	330.359.917
2	Kab. Konawe	-	284.131.970	284.131.970
3	Kab. Muna	-	375.229.956	375.229.956
4	Kota Kendari	-	1.850.854.160	1.850.854.160
5	Kota Baubau	-	351.396.169	351.396.169
6	Kab. Konawe Selatan	-	517.732.787	517.732.787
7	Kab. Wakatobi	-	211.872.391	211.872.391
8	Kab. Kolaka Utara	-	14.409.130	14.409.130
9	Kab. Konawe Utara	-	162.312.038	162.312.038
10	Kab. Buton Utara	-	150.652.769	150.652.769
XXVI	Provinsi Bali	699.890.115	18.175.769.650	18.875.659.765
1	Kab. Badung	121.188.224	3.400.601.807	3.521.790.031
2	Kab. Bangli	38.491.745	955.865.785	994.357.530
3	Kab. Buleleng	51.236.157	2.581.449.927	2.632.686.084
4	Kab. Gianyar	164.438.457	2.605.749.981	2.770.188.438
5	Kab. Jembrana	49.504.934	1.438.196.350	1.487.701.284
6	Kab. Karangasem	-	1.158.561.027	1.158.561.027
7	Kab. Klungkung	-	1.192.511.910	1.192.511.910
8	Kab. Tabanan	65.563.846	2.400.155.063	2.465.718.909
9	Kota Denpasar	910.867.637	11.179.106.805	12.089.974.442



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

(dalam rupiah penuh)

NO	DAERAH	TAHUN ANGGARAN 2008 SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2010		TOTAL
		PPh WPOPDN	PPh PASAL 21	
1	2	3	4	5
XXVII	Provinsi Nusa Tenggara Barat	-	19.367.138.129	19.367.138.129
1	Kab. Bima	-	1.453.072.413	1.453.072.413
2	Kab. Dompu	-	1.615.629.592	1.615.629.592
3	Kab. Lombok Tengah	-	625.340.221	625.340.221
4	Kab. Lombok Timur	-	631.671.199	631.671.199
5	Kab. Sumbawa	-	1.201.184.980	1.201.184.980
6	Kota Mataram	76.078.709	16.388.291.313	16.464.370.022
7	Kota Bima	-	2.048.557.802	2.048.557.802
8	Kab. Sumbawa Barat	-	5.025.725.421	5.025.725.421
9	Kab. Lombok Utara	-	813.903.186	813.903.186
XXVIII	Provinsi Nusa Tenggara Timur	-	13.221.233.774	13.221.233.774
1	Kab. Ende	-	42.803.903	42.803.903
2	Kab. Flores Timur	-	1.194.212.651	1.194.212.651
3	Kab. Kupang	-	1.417.260.546	1.417.260.546
4	Kab. Lembata	-	764.468.078	764.468.078
5	Kab. Ngada	-	185.139.258	185.139.258
6	Kab. Sikka	60.236.240	1.587.763.771	1.648.000.011
7	Kab. Sumba Barat	-	208.558.873	208.558.873
8	Kab. Sumba Timur	-	207.424.099	207.424.099
9	Kab. Timor Tengah Selatan	-	1.039.753.814	1.039.753.814
10	Kota Kupang	-	11.350.856.060	11.350.856.060
11	Kab. Rote Ndao	-	834.567.227	834.567.227
12	Kab. Manggarai Barat	-	207.261.526	207.261.526
13	Kab. Nagekeo	-	232.957.363	232.957.363
14	Kab. Sumba Tengah	-	291.414.417	291.414.417
15	Kab. Sumba Barat Daya	-	315.515.773	315.515.773
16	Kab. Manggarai Timur	-	313.815.608	313.815.608
17	Kab. Sabu Raijua	-	153.592.250	153.592.250
XXIX	Provinsi Maluku	-	9.817.898.877	9.817.898.877
1	Kab. Maluku Tenggara Barat	-	852.289.181	852.289.181
2	Kab. Maluku Tengah	-	1.392.891.953	1.392.891.953
3	Kab. Maluku Tenggara	-	1.250.413.212	1.250.413.212
4	Kab. Buru	-	791.153.613	791.153.613
5	Kota Ambon	-	7.490.166.287	7.490.166.287
6	Kab. Seram Bagian Barat	-	730.111.701	730.111.701
7	Kab. Seram Bagian Timur	-	562.754.001	562.754.001
8	Kab. Kepulauan Aru	-	635.976.475	635.976.475
9	Kota Tual	-	339.082.887	339.082.887
10	Kab. Maluku Barat Daya	-	377.011.025	377.011.025
11	Kab. Buru Selatan	-	304.997.999	304.997.999
XXX	Provinsi Papua	-	17.451.721.439	17.451.721.439
1	Kab. Biak Numfor	-	480.476.749	480.476.749
2	Kab. Jayapura	-	1.218.990.149	1.218.990.149
3	Kab. Jayawijaya	-	2.035.748.620	2.035.748.620



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

(dalam rupiah penuh)

NO	DAERAH	TAHUN ANGGARAN 2008 SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2010		TOTAL
		PPh WPOPND	PPh PASAL 21	
1	2	3	4	5
4	Kab. Nabire	-	169.514.852	169.514.852
5	Kab. Paniai	-	257.432.699	257.432.699
6	Kab. Puncak Jaya	-	795.591.369	795.591.369
7	Kab. Kepulauan Yapen	-	452.127.007	452.127.007
8	Kota Jayapura	-	17.261.664.658	17.261.664.658
9	Kab. Sarmi	-	636.147.958	636.147.958
10	Kab. Keerom	-	828.072.153	828.072.153
11	Kab. Yahukimo	-	464.862.038	464.862.038
12	Kab. Pegunungan Bintang	-	1.125.805.796	1.125.805.796
13	Kab. Tolikara	-	466.276.772	466.276.772
14	Kab. Boven Digoel	-	567.525.916	567.525.916
15	Kab. Mappi	-	615.449.663	615.449.663
16	Kab. Asmat	-	467.029.118	467.029.118
17	Kab. Waropen	-	388.972.341	388.972.341
18	Kab. Supiori	-	371.832.833	371.832.833
19	Kab. Mamberamo Raya	-	374.294.781	374.294.781
20	Kab. Mamberamo Tengah	-	169.457.526	169.457.526
21	Kab. Yalimo	-	224.059.883	224.059.883
22	Kab. Lanny Jaya	-	221.007.581	221.007.581
23	Kab. Nduga	-	210.811.829	210.811.829
24	Kab. Puncak	-	346.416.477	346.416.477
25	Kab. Dogiyai	-	130.509.987	130.509.987
1	Kab. Sorong	-	2.495.153.092	2.495.153.092
2	Kab. Fak Fak	-	10.009.277	10.009.277
3	Kota Sorong	-	3.748.875.956	3.748.875.956
4	Kab. Sorong Selatan	-	467.719.804	467.719.804
5	Kab. Raja Ampat	-	213.649.271	213.649.271
6	Kab. Teluk Wondama	-	34.971.502	34.971.502
7	Kab. Kaimana	-	622.051.636	622.051.636
Total		114.178.678.131	2.564.885.971.869	2.679.064.650.000

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM

u.b.  
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO  
NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 157 /PMK.07/2012  
TENTANG  
ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DANA  
BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DAN PASAL  
29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN  
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN ANGGARAN 2008,  
TAHUN ANGGARAN 2009, DAN TAHUN ANGGARAN 2010

RINCIAN ALOKASI LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DAN PASAL 29  
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21  
TAHUN ANGGARAN 2008, TAHUN ANGGARAN 2009, DAN TAHUN ANGGARAN 2010

(dalam rupiah penuh)

NO	DAERAH	TAHUN ANGGARAN 2008 SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2010		TOTAL
		PPh WPOPDN	PPh PASAL 21	
1	2	3	4	5
I	Provinsi Kepulauan Riau	927.667.308	10.101.900.347	11.029.567.655
II	Provinsi Maluku Utara	375.735.476	8.190.132.049	8.565.867.525
III	Provinsi Papua Barat	379.626.343	476.151.021	855.777.364
1	Kab. Bengkalis	275.148.313	9.438.937.723	9.714.086.036
2	Kab. Siak	-	7.215.448.245	7.215.448.245
3	Kab. Bintan	111.126.302	1.956.210.861	2.067.337.163
4	Kota Batam	835.334.937	16.375.507.990	17.210.842.927
5	Kab. Lingga	80.583.727	684.003.456	764.587.183
6	Kab. Kepulauan Anambas	87.434.111	1.001.274.030	1.088.708.141
7	Kab. Musi Banyuasin	83.503.306	3.480.706.278	3.564.209.584
8	Kab. Muara Enim	137.588.974	657.101.436	794.690.410
9	Kab. Ogan Komering Ilir	242.584.778	-	242.584.778
10	Kota Prabumulih	180.195.537	1.174.313.544	1.354.509.081
11	Kab. Banyuasin	107.347.167	814.210.190	921.557.357
12	Kab. Bangka	3.382.603	384.543.062	387.925.665
13	Kab. Bangka Tengah	5.961.756	84.726.628	90.688.384
14	Kab. Tulang Bawang	264.414.832	-	264.414.832
15	Kab. Bekasi	5.887.310.458	30.281.514.855	36.168.825.313
16	Kab. Landak	-	184.030.834	184.030.834
17	Kab. Pontianak	-	428.604.154	428.604.154
18	Kab. Sanggau	27.730.114	505.485.999	533.216.113
19	Kab. Kotawaringin Barat	148.372.936	1.914.647.067	2.063.020.003
20	Kab. Kotabaru	93.745.078	3.518.693.143	3.612.438.221
21	Kab. Tabalong	431.383.472	960.977.329	1.392.360.801
22	Kab. Tanah Bumbu	89.779.629	153.511.190	243.290.819
23	Kab. Kutai Kartanegara	-	3.621.026.530	3.621.026.530
24	Kab. Kutai Barat	12.848.482	1.433.042.517	1.445.890.999
25	Kab. Kutai Timur	90.495.890	7.175.638.657	7.266.134.547
26	Kota Bontang	366.555.702	12.147.198.997	12.513.754.699
27	Kab. Penajam Paser Utara	16.065.283	88.606.203	104.671.486
28	Kab. Bolaang Mongondow	14.133.180	116.261.663	130.394.843
29	Kab. Minahasa Selatan	24.057.602	261.943.423	286.001.025
30	Kab. Minahasa Tenggara	13.455.045	38.091.205	51.546.250
31	Kab. Tolitoli	47.108.877	454.004.813	501.113.690
32	Kab. Kolaka	75.506.280	274.716.728	350.223.008
33	Kab. Bombana	3.434.658	-	3.434.658
34	Kab. Lombok Barat	85.769.362	742.978.259	828.747.621





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

(dalam rupiah penuh)

NO	DAERAH	TAHUN ANGGARAN 2008 SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2010		TOTAL
		PPh WPOPND	PPh PASAL 21	
1	2	3	4	5
35	Kab. Alor	39.852.720	91.906.844	131.759.564
36	Kab. Belu	58.421.938	305.387.686	363.809.624
37	Kab. Manggarai	24.943.862	-	24.943.862
38	Kab. Timor Tengah Utara	18.733.671	36.504.027	55.237.698
39	Kab. Halmahera Tengah	18.833.998	823.466.693	842.300.691
40	Kab. Halmahera Barat	16.696.361	412.526.134	429.222.495
41	Kota Ternate	96.034.378	5.665.930.245	5.761.964.623
42	Kab. Halmahera Timur	18.234.495	576.087.430	594.321.925
43	Kota Tidore Kepulauan	333.071.537	1.159.863.033	1.492.934.570
44	Kab. Kepulauan Sula	22.227.242	776.612.323	798.839.565
45	Kab. Halmahera Selatan	25.277.860	771.279.603	796.557.463
46	Kab. Halmahera Utara	14.356.189	1.626.139.125	1.640.495.314
47	Kab. Pulau Morotai	18.871.146	473.293.475	492.164.621
48	Kab. Merauke	183.426.737	324.071.269	507.498.006
49	Kab. Mimika	-	3.472.149.463	3.472.149.463
50	Kab. Intan Jaya	-	65.499.838	65.499.838
51	Kab. Deiyai	-	57.349.231	57.349.231
52	Kab. Manokwari	85.074.907	1.320.565.613	1.405.640.520
53	Kab. Teluk Bintuni	17.663.445	7.432.280.095	7.449.943.540
54	Kab. Tambrauw	8.834.919	1.224.700	10.059.619
55	Kab. Maybrat	8.984.825	1.468.062	10.452.887
Total		12.534.927.748	151.729.745.315	164.264.673.063

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO  
NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO